

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Novia Ika Rahmadhani¹, Hasim A'ari²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: novia.ika4403@student.unri.ac.id¹, hasimasari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban para petani dalam hal pembelian pupuk, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pupuk subsidi. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah banyak para petani yang masih sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menjelaskan bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak di jalankan, serta untuk menemukan kendala apa saja yang menghalangi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Studi ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, yang memiliki enam indikator: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik Organisasi, Kondisi sosial, ekonomi dan politik dan Sikap pelaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak kurang optimal dan tidak berjalan dengan baik. Hal ini di sebabkan oleh beberapa kendala, termasuk kios pengecer tidak mencantumkan harga HET (harga eceran tertinggi) pupuk subsidi, Kemasan pupuk subsidi yang sudah rusak, data penerima pupuk tidak terdaftar di system RDKK (rencana definitive kebutuhankelompok), akses internet untuk aplikasi I-pubers tidak bagus, dan data jumlah kebutuhan pupuk subsidi tidak sinkron.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Penyaluran, Pupuk Bersubsidi*

Abstract

The implementation of the policy of distributing subsidized fertilizer to the agricultural sector is a policy made by the government which aims to ease the burden on farmers in terms of purchasing fertilizer, for this reason the government issued a subsidized fertilizer policy. The background to this research is that many farmers still find it difficult to obtain subsidized fertilizer. The aim of this research is to see and explain how the distribution of subsidized fertilizer in Bungaraya District, Siak Regency is carried out, as well as to find any obstacles that hinder its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach. With interviews, documentation and observation as data collection methods. This study uses Van Meter and Van Horn's theory, which has six indicators: Policy standards and targets, resources, communication between organizations, organizational characteristics, social, economic and political conditions and implementing attitudes. The results of this research indicate that the distribution of subsidized fertilizer in Bungaraya District, Siak Regency is less than optimal and is not running well. This is caused by several obstacles, including retail kiosks not including the HET price (highest retail price) for subsidized fertilizer, damaged packaging for subsidized fertilizer, fertilizer recipient data not registered in the RDKK system (definitive plan for group needs), internet access for the I-application. puberty is not good, and data on the amount of subsidized fertilizer needed is not synchronized

Keywords: *Policy Implementation, Distribution, Subsidized Fertilizer*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Usaha pentingnya sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Indonesia. komoditas pertanian berperan penting dalam penyediaan pangan masyarakat, menciptakan ketahanan pangan nasional, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan ketahanan sosial. Selain ketersediaan lahan, produksi pertanian juga di perlukan ketersediaan pupuk. Pupuk diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Pentingnya pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian sangatlah penting bagi petani. Namun, kebanyakan petani tidak mampu membeli pupuk karena harganya yang mahal. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan kepada petani agar mudah dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dan kebijakan itu di atur dalam peraturan menteri perdagangan nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian. Namun untuk permasalahan dalam fenomena yang penulis ambil dari penelitian ini ialah tentang proses penyaluran pupuk subsidi untuk sector pertanian. Penyaluran yang dimaksud dalam peraturan menteri perdagangan termuat dalam pasal 1 ayat 1 pada peraturan menteri perdagangan nomor 04 tahun 2023 adalah penyaluran merupakan proses pupuk bersubsidi dari produsen sampai ke petani atau kelompok tani sebagai konsumen. Dalam peraturan menteri perdagangan ini ada beberapa hal yang di atur khususnya dalam hal penyaluran diantaranya: Holding BUMN, distributor dan pengecer.

Proses penyaluran pupuk subsidi untuk sampai ke tangan petani atau kelompok tani diwajibkan para petani menggunakan ktp asli pemilik lahan dalam aplikasi I-Pubers yang di akses di kios pengecer. Aplikasi I-Pubers adalah aplikasinya yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian RI dan PT Pupuk Indonesia Persero untuk memudahkan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang meyeentuh langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola lahan. Oleh karena itu, ketika pupuk langka dan harganya mahal maka petanilah yang akan menjadi korban utamanya. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan pupuk, pupuk adalah bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau menggantikan unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani sedangkan pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi. Adapun pengertian pupuk bersubsidi menurut peraturan menteri perdagangan nomor 04 tahun 2023 merupakan pupuk yang cara pengadaannya dan penyalurannya mendapatkan subsidi oleh pemerintah untuk petani dalam sektor pertanian.

Adapun tujuan untuk penyediaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penganturan dan mengelola pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi dan memberikan petunjuk satuan kerja perangkat daerah dalam melakukan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, khususnya petani padi sesuai ke ketentuan yang berlaku.

Penyaluran pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah ini berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan Provinsi terkaya di Indonesia karena Riau sumber dayanya di dominasi oleh sumber alam terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Dalam data sensus pertanian 2023 jumlah usaha pertanian di Provinsi Riau mencapai 729.241 unit yang terdiri dari 728.647 usaha pertanian perorangan, 322 perusahaan pertanian berbadan hukum dan 271 usaha pertanian lainnya dan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Riau Sebanyak 706.035 rumah tangga.

Kabupaten Siak merupakan wilayah kabupaten di Provinsi Riau, Ibu kota Siak ialah Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak sendiri memiliki 14 kecamatan yaitu Kecamatan Siak, Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Dayun, Kecamatan Koto Gasip, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Tualang, Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Pusako.

Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Bungaraya. Kecamatan Bungaraya itu sendiri tidak jauh berbeda Kabupaten Siak dengan kondisi daratan yang

rendah, bergelombang, dan sedikit bukit. Jumlah desa yang berada pada Kecamatan Bungaraya yaitu empat belas desa diantaranya ialah: Desa Bungaraya, Jayapura, Jatibaru, Sungai Berbari, Sungai Limau, Dosan, Benayah, Perbadaran, Dusun Pusaka, Perincit, TuahIndrapura, Buatn Lestari, Langsung Permai, dan Ke muning Muda. Di Kecamatan Bungaraya itu sendiri ada sembilan Desa yang terdapat sektor pertanian yang berkomoditas padi, cabai, dan jagung. Di sembilan Desa tersebut terdapat tujuh puluh empat kelompok tani.

Berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh melalui wawancara peneliti peroleh saat prariset dengan tiga orang petani pada hari Sabtu 13 Juli 2024 mereka menyampaikan permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi mengalami kesulitan. Yang pertama para petani padi pada Kecamatan Bungaraya mengetahui bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tanaman padi mereka pada saat musim tanam telah tiba, yang kedua proses pengambilan pupuk bersubsidi harus menggunakan ktp asli pemilik lahan, jika pemilik lahan sudah meninggal atau terkena penyakit seperti struke tetap tidak bias mengambil pupuk bersubsidi meskipun pengambilan pupuk tersebut di wakikan oleh anak si pemilik lahan tersebut, yang ketiga dalam proses pengambilan pupuk bersubsidi juga tidak seluruhnya petani mendapatkan pupuk tersebut dan yang ke empat apabila ada penyewa lahan pertanian di yang lahan petani lain maka pupuk bersubsidi juga tidak bisa di peroleh. Berdasarkan masalah atau fenomena yang terjadi maka, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lokasi penelitian dikecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau. Adapun penulis memilih Kecamatan Bungaraya selbagai objek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang ada, di Kecamatan Bungaraya dalam penyaluran pupuk bersubsidi mengalami perumitan bagi petani sehingga petani mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi tersebut. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Bidang sarana dan Prasarana Pertanian Bapak Heri Eko S.P., M.M. Alasan peneliti mewawancarai Kabid Sarana dan Prasaran Pertanian karena informan lebih mengetahui proses penyaluran pupuk bersubsidi, Kepala BPP/UPT Pertanian Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Bapak Andri S.P. Alasan peneliti mewawancarai kepala BPP/UPT karena informan lebih mengetahui proses penyaluran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Distributor pupuk bersubsidi, KUD Tandan Masjaya diketuai oleh Bapak Heriyanto. Alasan peneliti mewawancarai ketua KUD Tandan Masjaya karena informan lebih mengetahui pendistribusian pupuk bersubsidi pada Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Pengecer atau Kios Pengecer, Bapak Yayan. Alasan peneliti mewawancarai informan karena informan lebih mengetahui pengeceran pupuk bersubsidi pada Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dan Petani Bapak Misruh, Wulyono, Ismanto, Suginato, Sukarso dan Rohim. Alasan peneliti mewawancarai para petani karena informan lebih mengetahui permasalahan apa saja yang terdapat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi untuk tanaman komoditas pertanian milik mereka pada Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, raduksi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Bungaraya

Standar dan sasaran kebijakan, dasarnya adalah apa yang hendak di capai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Hal tersebut juga di utarakan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasaran Pertanian:

“Seluruh aturan mengenai kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian telah lengkap pada pasal 6 sampai 14 pada peraturan menteri perdagangan no 4 tahun 2023 sehingga kami sebagai pelaksana telah memiliki pedoman yang kuota dan jelas.” (wawancara dengan Bapak Heri Eko S.P., M.M, 7 Oktober 2024).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya manusia tersebut, sumber daya-sumber daya lain perlu diperhitungkan juga antara lain sumber daya finansial dan waktu.

“Kalau sumber daya manusia sudah mencukupi dalam kelompok kerja penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari anggota mengangkut pupuk dan menimbang pupuk, kemudian masalah jumlah tahun ini pupuk NPK 767.726 Ton dan Urea 551.765 Ton untuk di salurkan ke kios pengecer kemudian di salurkan ke petani.” (wawancara dengan Bapak Heriyanto Distributor Pupuk Subsidi atau Ketua KUD Tandan Masjaya, pada 21 Oktober 2024).

Komunikasi yang baik dapat mewujudkan suatu tujuan dari kebijakan. Dengan adanya hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah merupakan actor sebagai pembuat kebijakan, sedangkan yang melakukan proses implementasi adalah Distributor pupuk bersubsidi, sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Heriyanto selaku Distributor pupuk subsidi dan ketua KUD Tandan Masjaya, mengatakan:

“Kami sebagai pihak distributor yang merupakan pelaksana kebijakan ini melibatkan kios pengecer dengan tujuan di sampaikan kepada petani. Komunikasi yang disampaikan disini ialah memastikan agar pupuk subsidi yang disalurkan ini tepat sasaran kepada para petani.” (wawancara dengan Bapak Heriyanto Distributor Pupuk Subsidi atau Ketua KUD Tandan Masjaya, pada 21 Oktober 2024).

Dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian mengikuti SOP yang telah dijelaskan dalam peraturan menteri perdangan no 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kepala bidang sarana dan prasarana pertanian sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaannya untuk proses penyalurannya pupuk subsidi sudah berpedoman kepada petunjuk teknis pada permendag no 4 tahun 2023 yaitu dari holding bumh ke distributor ke kios pengecer ke petani.” (wawancara dengan Bapak Heri Eko S.P., M.M, 7 Oktober 2024).

Kondisi social memberikan pengaruh terhadap implementasi sebuah program. Petani yang menjadi pihak yang memiliki pengaruh langsung terhadap penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian. Kecamatan Bungaraya merupakan sebuah Kecamatan yang penghasil beras atau padi terbesar di Kabupaten Siak, untuk itulah dibutuhkan peran pemerintah yang baik dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam hal ini juga di kemukakan oleh Koordinator penyuluh pertanian atau BPP Bapak Andri S.P, mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pendamping kios pengecer dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bungaraya ini, apabila di suatu desa atau petani membutuhkan pupuk bersubsidi kami pastikan para petani tidak kekurangan dengan adanya pupuk bersubsidi ini dan apabila petani membutuhkan pupuk subsidi ini di pastikan selalu ada terus atau ready di kios pengecer.” (wawancara dengan Bapak Andri S.P Koordinator Penyuluh Pertanian/ BPP, 21 Oktober 2024).

Faktor ekonomi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Van Meter dan Van Horn kondisi ekonomi dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi adalah tercukupinya pupuk dan menjadi kebutuhan yang meringankan beban para petani. Dalam hal ini di kemukakan oleh Ketua KUD Tandam Masjaya selaku distributor pupuk subsidi, mengatakan:

“Kalau untuk penyaluran pupuk bersubsidi petani sangat merasa terbantu karena dengan harga pupuk yang cenderung murah, jadi petani sangat merasa terbantu dengan adanya pupuk bersubsidi ini.” (wawancara dengan Bapak Heriyanto Distributor Pupuk Subsidi atau Ketua KUD Tandan Masjaya, pada 21 Oktober 2024).

Kondisi politik tidak kalah penting dalam mempengaruhi suatu program selain kondisi social dan ekonomi. Dukungan elit politik juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah dukungan pemerintah Kabupaten Siak terhadap proses penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian. Dalam hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, mengatakan:

“Kami sebagai Dinas Pertanian yang menjalin kerja sama dengan pihak BPP Bungaraya memastikan bahwa di setiap daerah atau desa yang ada di Bungaraya membutuhkan pupuk bersubsidi mereka tidak kekurangan dan kami cukup baik untuk menangani kondisi penyaluran pupuk subsidi ini.” (wawancara dengan Bapak Heri Eko S.P., M.M, 7 Oktober 2024).

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran. Sebagai agen pelaksana kebijakan tentunya pegawai memiliki sikap berbeda-beda dalam melaksanakannya seperti ada yang menganggap sebagai tugas, sebagai kebiasaan tidak peduli kepada berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut, maka dari itulah dibutuhkan sikap yang responsive, mengutamakan petani dan mendukung kebijakan secara penuh demi keberhasilan kebijakan.

“Kami sebagai distributor pupuk subsidi sudah selalu konsisten dalam melaksanakan proses penyaluran pupuk bersubsidi yang di minta kios pengecer untuk waktu yang di butuhkan atau diperlukan.” (wawancara dengan Bapak Heriyanto Distributor Pupuk Subsidi atau Ketua KUD Tandan Masjaya, pada 21 Oktober 2024).

Kendala dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Bungaraya

Harga eceran tertinggi atau di singkat (HET) merupakan harga eceran tertinggi yang di tetapkan untuk pupuk subsidi dan kios pengecer pupuk subsidi wajib menyalurkan pupuk subsidi sesuai HET. Dalam hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, mengatakan:

“Dalam proses penyaluran pupuk subsidi Kios Pengecer pupuk subsidi tidak mencantumkan HET sesuai dengan aturan yang ada, karena ada tambahan biaya bagi anggota pemilik pupuk subsidi di kios pengecer dan kios pengecer juga jauh dari para petani hal ini lah yang menjadi kendala kami di lapangan.” (wawancara dengan Bapak Heri Eko S.P., M.M, 7 Oktober 2024).

Masalah stok pupuk subsidi yang rapuh ada di gudang distributor akan mengalami kerusakan pada kain atau goni pupuk tersebut yang menyebabkan terhambatnya proses penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Ketua KUD Tandan Masjaya sekaligus distributor pupuk bersubsidi, mengatakan:

“Kalau untuk saat ini pupuk yang digudang itu stok lama dan karungnya mudah robek, hal inilah membuat distributor mengalami kesulitan.” (wawancara dengan Bapak Heriyanto Distributor Pupuk Subsidi atau Ketua KUD Tandan Masjaya, pada 21 Oktober 2024).

Terhambatnya proses penyaluran pupuk subsidi juga di karenakan tidak terdaftarnya data penerima pupuk subsidi di RDKK hal inilah menjadi kesulitan bagi Distributor pupuk subsidi dan kios pengecer pupuk subsidi pada saat proses penyaluran pupuk bersubsidi berlangsung. Hal ini dikemukakan oleh pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Bungaraya, mengatakan:

“Ada nama nama para petani yang tidak terdaftar pada saat penebusan pupuk subsidi di RDKK yang di pengaruhi oleh system yang terkadang lewat waktu.” (wawancara oleh Bapak yayan pemilik kios pengecer Kecamatan Bungaraya, pada 21 Oktober 2024).

Akses internet merupakan kemampuan untuk terhubung ke jaringan internet dalam menggunakan perangkat atau aplikasi seperti computer dan sejenisnya. Dalam hal ini proses penebusan atau penyaluran pupuk subsidi menggunakan aplikasi I-Pubers dimana aplikasi ini harus digunakan dalam akses internet atau jaringan yang bagus dan memadai. Terjadinya hambatan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi di kios pengecer karena jaringan kurang memadai mengakibatkan antrian yang sangat panjang. Hal ini dikemukakan oleh para petani di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, mengatakan:

“kendala yang para petani alami sampai sekarang adalah antrian yang panjang, kadang antrian bias sampai satu harian dan alhasil ada petani juga yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dan banyak yang protes karena lamanya proses pengambilan pupuk bersubsidi tersebut.” (wawancara dengan petani di Kecamatan Bungaraya Bapak Ismanto 16 Oktober 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan distributor diketahui bahwa jumlah data jumlah pupuk subsidi berbeda di sampaikan oleh distributor pupuk subsidi bahwa alokasi atau jumlah stok pupuk subsidi tahun 2024 di KUD Tandan Masjaya yang sekaligus distributor pupuk subsidi berjumlah: pupuk npk berjumlah 767.726 ton dan Urea berjumlah 551.765 ton. Data berbeda di sampaikan oleh pemilik kios pengecer di Kecamatan Bungaraya adalah sebagai berikut:

“ Untuk jumlah pupuk subsidi yang ada di Kios Pengecer di Kecamatan Bungaraya ini, disalurkan untuk petani dengan Urea berjumlah 70 Ton dan NPK 90 Ton.”(wawancara oleh Bapak yayan pemilik kios pengecer Kecamatan Bungaraya, pada 21 Oktober 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di bab v dimuka, terkait kebijakan penyaluran pupuk subsidi untuk sector pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupten Siak dapat di simpulkan bahwa Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak belum berjalan optimal karena masih terdapatnya banyak permasalahan seperti dalam aspek standar dan sasaran kebijakan petani masih belum puas dengan jumlah pupuk yang diberikan pengambilan pupuk yang rumit apabila petani membutuhkan pupuk, dalam aspek sumber daya kios pengecer mengalami kesulitan saat berada di lapangan karena sinyal untuk mengakses aplikasi I-Pubers kurang bagus dan para petani masih mengeluhkan jumlah pupuk yang masih kurang dan masih membeli pupuk yang non subsidi untuk sector pertanian mereka, dalam aspek komunikasi antar organisasi pihak distributor dan kios pengecer sudah bagus dalam menjalankan tugasnya akan tetapi para petani tidak pernah di beritahu ketika ada sosialisasi tentang pertanian yang di adakan pihak Dinas Pertanian. Dalam Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, kendala yang menjadi pengambat proses penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Bungaraya adalah: kios pengecer tidak mencantumkan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk subsidi, kemasan pupuk subsidi sudah rusak, data penerima pupuk bersubsidi tidak terdaftar di sistem RDKK, akses internet untuk aplikasi e -Puber tidak bagus dan data jumlah kebutuhan pupuk subsidi tidak sinkron antara Dinas Pertanian Kabupaten Siak, KUD Tandan Masjaya Kabupaten Siak, dan Kios Pengecer Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan. A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik Studi Relokasi Pasar*. CV. PENA PERSADA
- Anggara. S. (2018). *Kebijakan Publik*. PUSTAKA SETIA BANDUNG
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik, Teori, dan Praktik*. PT.Literasi Nusantara Abadi
- Dewi.S.K.S. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Samudra Biru
- Fajarwati. A dan Rahmadila. U. (2022). *Model Kebijakan Meriee Grindle*. Jurnal Dialog. Vol 7.
- Frank. F. Mille r. J. G dan Sidne y. S. M.(2005) *Handbook Of Public Policy Analysis*. New York Amerika.
- Igrisa.I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Penerbit. Tanah. Air. Be ta
- Kadji.Y. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung
- Lestari. N dan As'ari. H. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 8.
- Marwiyah.S. (2022). *Kebijakan Publik*. BUKU AJAR
- Me diana. W. dan As'ari. H. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah. Vol 3.
- Nugroho. A dan Maulana. D. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijwkan Publik*. CV. AA. RIZKY
- Putra. R.I, Yuliani. F. dan As'ari. H. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota)*. Jurnal Niara.Vol. 14.
- Rianto. P. (2020:101). *Metode Penelitian Kualitatif*. Komukasi UII

- Semiawan. (2010:112). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*.
- Subianto. A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Brilliant an imprint of MIC Publishing.
- Suhirwan (2022). *Teori Kebijakan Publik Top Down dan konsep Kebijakan Pertahanan*. UNHAN RI PRESS.
- Tachan (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung
- Yanti. K. N. N. (2022). *Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia*. Widyanata Jurnal Ilmiah. Vol 19.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- ANTARA.Ne ws.2024.04 Juli. *Tekad Siak Wujudkan Swasembada Beras*. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.
<https://www.antarnews.com/berita/4182390/tekad-siak-wujudkan-swasembada-beras>
- Publik.news.com. 2023. 22 September. *Jumat curhat dibungan raya, kapolres siak dengarkan keluhan klangkaan pupuk bersubsidi*. Diakses pada tanggal 15 juli 2024.
<https://publiknews.com/hukum-kriminal/berita/9685/jumat-curhat-di-bungaraya-kapolres-siak-dengarkan-keluhan-kelangkaan-pupuk-subsidi>
- Publik.news.com. 2023. 23 September. *Petani Bungaraya Keluhkan Pupuk Bersubsidi, Ini penjelasan Dinas Pertanian Kabupaten Siak*. Diakses pada tanggal 17 juli 2024
<https://publiknews.com/siak/berita/9689/petani-bungaraya-keluhkan-pupuk-subsidi-ini-penjelasan-dinas-pertanian-siak>
- Riauonline . 2024. 05 Februari. *Petani Bungaraya siak keluhkan sulitnya dapat pupuk susidi: Bertele -tele*. Diakse pada tanggal 12 juli 2024.
<https://www.riauonline.co.id/siak/read/2024/02/05/petani-bungaraya-siak-keluhkan-sulitnya-dapat-pupuk-subsidi-bertele-tele>